

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kinerja Keuangan

Persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut setiap perusahaan untuk meningkatkan kinerja agar tidak kehilangan kepercayaan dari masyarakat atau investor. Cara perusahaan untuk mengetahui meningkat atau tidaknya kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan mengukur perkembangan kinerja dari tahun ke tahun. Pada umumnya kinerja terbagi menjadi dua hal yaitu kinerja keuangan dan kinerja non-keuangan. Menurut Fahmi dalam penelitian Kartikasari (2016) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dan menggunakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar, seperti membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan), GAAP (Generally Accepted Accounting Principles), atau yang lainnya. Kinerja keuangan perusahaan ini merupakan suatu pengukuran yang menggambarkan keefektifan perusahaan dalam pengelolaan asset yang dimiliki perusahaan untuk kegiatan operasional dan memperoleh laba.

2.1.1.1 Faktor-faktor Kinerja Keuangan

Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan perusahaan menurut Hastuti dan Mulyati dalam penelitian Kartikasari (2016), antara lain sebagai berikut:

1. Terkonsentrasi atau tidak terkonsentrasinya kepemilikan. Kepemilikan yang banyak terkonsentrasi oleh institusi akan memudahkan pengendalian sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan.
2. Manipulasi laba merupakan upaya manajemen untuk mengubah laporan keuangan yang bertujuan menyesatkan pemegang saham yang ingin mengetahui kinerja perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontraktual yang mengandalkan angka-angka akuntansi yang dilaporkannya.
3. Pengungkapan Laporan Keuangan (Disclosure) Disclosure sebagai salah-satu aspek Good Corporate Governance diharapkan dapat menjadi dasar untuk melihat baik tidaknya kinerja perusahaan. Hal ini kontradiktif dengan perilaku oportunitis.

2.1.1.2 Metode pengukuran Kinerja Keuangan

Menurut Kasmir (2010:110-116), analisa rasio keuangan meliputi 4 tolak ukur yaitu:

1. Rasio likuiditas

Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban utang jangka pendek. artinya apabila perusahaan ditagih, maka akan mampu untuk memenuhi utang (membayar) tersebut terutama utang yang telah jatuh tempo

2. Rasio Solvabilitas

Rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan yang dibiayai dengan utang. artinya, berapa besar beban utang yang di tanggung perusahaan dibandingkan dengan aktiva.

3. Rasio Aktivitas

Rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang di milikinya.

4. Rasio Profitabilitas

Rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan mencari keuntungan.

Dari ke empat rasio tersebut, yang berkaitan langsung dengan kepentingan analisis kinerja keuangan yaitu profitabilitas dan dalam penelitian ini return on asset (ROA) di gunakan sebagai alat analisis utama dalam indikator penilaian kinerja.

2.1.2 Good Corporate Governance

Menurut Organizational For Economic Corporation and Development (OECD) dalam penelitian Limanto dan Juniarti (2014) mendefinisikan Good Corporate Governance sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Corporate governance berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu diterapkannya GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan.

Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) dalam penelitian Puniyasa dan Triaryati (2016) mendefinisikan Good Corporate Governance sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.

Menurut Shleifer dan Vishny dalam penelitian Puniyasa dan Triaryati (2016) menyatakan bahwa corporate governance merupakan suatu mekanisme yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa supplier keuangan atau pemilik modal perusahaan memperoleh pengembalian atau return dari kegiatan yang dijalankan oleh manajer, atau bagaimana supplier keuangan perusahaan melakukan pengendalian terhadap manajer.

Menurut Wijayanti dalam penelitian Puniayasa dan Triaryati (2016) pengelolaan perusahaan yang semakin kompleks akan meningkatkan kebutuhan perusahaan untuk menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik dengan tujuan untuk memastikan aktivitas manajemen dalam perusahaan akan berjalan dengan baik. Good Corporate Governance (tata kelola perusahaan) merupakan seperangkat sistem untuk mengatur hubungan antara manajer, pemilik perusahaan dan para stakeholder lainnya yang terkait dengan hak dan kewajiban mereka. Menurut Macey dan O'Hara dalam penelitian Puniayasadan Triaryati (2016) masalah utama yang mendasari penerapan Good Corporate Governance yaitu adanya pemisahan antara pengelola perusahaan dengan kepemilikan perusahaan atau disebut dengan masalah keagenan. Permasalahan keagenan timbul akibat sulitnya menyatukan kepentingan dari pihak pemilik dengan pengelola. Untuk itu dibutuhkan Good Corporate Governance untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer.

2.1.2.1 Manfaat Good Corporate Governance

1. Dengan *good corporate governance* proses pengambilan keputusan akan langsung baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat.
2. *Good corporate governance* memungkinkan dihindarinya atau sekurang-kurangnya dapat meminimalisasi terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan maupun pihak yang berkepentingan lainnya.
3. Nilai perusahaan dimata investor meningkat akibat meningkatnya kepercayaan mereka terhadap pengelolaan perusahaan tempat mereka berinvestasi.

4. Bagi para pemegang saham, peningkatan kinerja merupakan point penting yang utama yang akan menaikkan nilai saham mereka dan juga nilai deviden yang akan diterima.
5. Penerapan *good corporate governance* yang konsisten juga akan meningkatkan laporan keuangan perusahaan untuk mematuhi berbagai aturan dan prinsip akuntansi yang berlaku dan penyajian informasi yang transparan. (Wahyudin Zarkasyi dalam Ristifani).

2.1.2.2 Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Menurut The Organization for Economic Corporation and Development (OECD) dalam penelitian Puniyasa dan Triaryati (2016), ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam penerapan corporate governance yaitu sebagai berikut :

A. Transparency (Keterbukaan)

Keterbukaan kepada stakeholders dalam melakukan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan dengan lima karakteristik, yaitu komprehensif, relevan, friendly, reliable, dan comparable. Informasi mengenai laporan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan harus diungkapkan secara tepat dan akurat agar pemegang saham dan pihak lainnya dapat mengetahui keadaan perusahaan.

B. Accountability (Akuntabilitas)

Kejelasan fungsi, struktur, sistem pengendalian, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan dan keseimbangan kekuasaan antara stakeholders terlaksana secara efektif. Para anggota eksekutif seperti komisaris, direksi, dan jajarannya wajib memiliki integritas untuk menjalankan usaha sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

C. Responsibility (Pertanggungjawaban)

Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip ini menuntut agar seluruh jajaran perusahaan untuk melakukan tugasnya dengan bertanggungjawab dan mematuhi hukum yang ditetapkan.

D. Independency (Kemandirian)

Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan dan pengaruh dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

E. Fairness (Keadilan)

Perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Setiap keputusan yang diambil senantiasa memperhatikan kepentingan dan memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas. Melindungi semua pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas dari rekayasa dan transaksi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

2.1.2.3 Metode pengukuran Good Corporate Governance

Penilaian terhadap good corporate governance menggunakan:

- A. keberadaan komite audit = merupakan variabel dummy, bagi perusahaan yang memiliki komite audit maka akan mendapat nilai 1, sedangkan perusahaan yang tidak memiliki komite audit mendapat nilai 0.
- B. Komposisi komisaris independen = dihitung dengan persentase jumlah komisaris independen terhadap jumlah total komisaris yang ada dalam susunan dewan komisaris.
- C. Kepemilikan institusional = dihitung dengan besarnya persentase saham yang dimiliki oleh investor institusional.

D. Kepemilikan manajerial= dihitung dengan besarnya persentase saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan.

2.1.3 Kepemilikan Institusional

Jensen dan Meckling (1976) dalam Permasari (2010) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil manajer. Hal ini disebabkan investor terlibat dalam pengambilan keputusan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008) dalam Wien Ika Permasari (2010). Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal.

Kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain:

1. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi.
2. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

2.1.4 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang di kelola (Boediono, 2005).

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan

yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (Sujono dan Soebiantoro, 2007 dalam Sabrinna, 2010). Kepemilikan manajerial dapat diartikan sebagai pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris). Menurut Wahyudi dan Prawestri (2006) pengukuran kepemilikan manajerial adalah sebagai berikut:

$$KM = \frac{\text{Jumlahn saham direksi dan komisaris}}{\text{Jumlah total saham biasa}}$$

Gunarsih (2001) menyatakan bahwa kepemilikan perusahaan merupakan salah satu mekanisme yang dapat dipergunakan agar pengelola melakukan aktivitas sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan. Meningkatkan kepemilikan manajerial dapat digunakan sebagai cara untuk mengatasi masalah keagenan. Manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya yang juga merupakan keinginan dari para pemegang saham. Ross, et al. (1999) dalam Putri (2006) menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan saham pada perusahaan maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Kepemilikan saham manajerial akan membantu penyatuan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, sehingga manajer ikut merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut pula menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah

Morck, Shleifer dan Vishny (1997) dalam Siallagan dan Machfoedz (2006) menemukan bahwa pada level 0-5% terdapat hubungan non linier antara kepemilikan manajerial dengan kinerja keuangan perusahaan, berhubungan negatif pada level 5-25%, berhubungan positif antara kepemilikan manajerial dengan nilai perusahaan pada level 25-50% dan berhubungan negatif pada level > 50%

2.1.5 Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Komite Nasional Kebijakan Governance, (2006) menyatakan bahwa komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), 2003 menyatakan bahwa peran komisaris independen diharapkan mampu mendorong diterapkannya prinsip dan praktek GCG pada perusahaan-perusahaan publik di Indonesia, termasuk BUMN. Komisaris independen dalam penelitian ini diukur dengan membagi jumlah dewan komisaris independen dengan jumlah total dewan komisaris (Lai, 2005 dalam Andayani, 2010).

$$\text{DKI} = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah total dewan komisaris}}$$

Komisaris independen memikul tanggung jawab untuk mendorong secara proaktif agar komisaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas dan penasehat direksi dapat memastikan bahwa: (1) perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif (termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektifitas strategi tersebut), (2) memastikan perusahaan memiliki eksekutif dan manajer yang profesional, (3) memastikan perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja dengan baik, (4)

memastikan perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya, (5) memastikan risiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik serta (6) memastikan prinsip-prinsip dan praktek GCG dipatuhi dan diterapkan dengan baik (FCGI, 2003).

Komisaris independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat direksi, karena komisaris independen memiliki peranan penting dalam mengarahkan strategi dan mengawasi jalannya perusahaan serta memastikan bahwa para manajer benar-benar meningkatkan kinerja keuangan perusahaan sebagai bagian daripada pencapaian tujuan perusahaan. Komisaris independen diharapkan mampu mendorong dan menciptakan iklim yang lebih objektif, dan menempatkan kesetaraan (*fairness*) sebagai prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan stakeholder lainnya.

Komisaris independen memiliki peranan menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan, serta terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya komisaris independen merupakan suatu mekanisme independen untuk mengawasi dan memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan.

2.1.6 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*Agency theory*) merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut "*nexus of contract*".

Perbedaan “kepentingan ekonomis” ini bisa saja disebabkan ataupun menyebabkan timbulnya informasi asimetri (Kesenjangan Informasi) antara Pemegang Saham (*Stakeholders*) dan organisasi. Diskripsi bahwa manajer adalah agen bagi para pemegang saham atau dewan direksi adalah benar sesuai teori agensi.

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedang para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut.

Karena perbedaan kepentingan ini masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri. Prinsipal menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnya dan secepatnya atas investasi yang salah satunya dicerminkan dengan kenaikan porsi deviden dari tiap saham yang dimiliki. Agen menginginkan kepentingannya diakomodir dengan pemberian kompensasi/bonus/insentif/remunerasi yang “memadai” dan sebesar-besarnya atas kinerjanya. Prinsipal menilai prestasi Agen berdasarkan kemampuannya memperbesar laba untuk dialokasikan pada pembagian deviden. Makin tinggi laba, harga saham dan makin besar deviden, maka Agen dianggap berhasil/berkinerja baik sehingga layak mendapat insentif yang tinggi.

Sebaliknya Agen pun memenuhi tuntutan Prinsipal agar mendapatkan kompensasi yang tinggi. Sehingga bila tidak ada pengawasan yang memadai maka sang Agen dapat memainkan beberapa kondisi perusahaan agar seolah-olah target tercapai. Permainan tersebut bisa atas prakarsa dari Prinsipal ataupun inisiatif Agen sendiri. Maka terjadilah *Creative Accounting* yang menyalahi aturan, misal: adanya piutang yang tidak mungkin tertagih yang tidak dihapuskan; Biaya modal yang tidak

semestinya; Pengakuan penjualan yang tidak semestinya; yang kesemuanya berdampak pada besarnya nilai aktiva dalam Neraca yang “mempercantik” laporan keuangan walaupun bukan nilai yang sebenarnya. Atau bisa juga dengan melakukan *income smoothing* (membagi keuntungan ke periode lain) agar setiap tahun kelihatan perusahaan meraih keuntungan, padahal kenyataannya merugi atau laba turun.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu menggunakan variabel yang berbeda-beda dalam menganalisis pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Nugrahanti dan Novia (2012) bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan sebagai mekanisme CG terhadap kinerja perbankan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia selama periode 2009-2010. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representative sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap risiko financial perusahaan. Sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap risiko financial perusahaan.

Lestari (2013) bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh good corporate governance terhadap kinerja perusahaan (Tobin's Q) pada perusahaan jasa non keuangan. Komponen Corporate Governance yang digunakan dalam penelitian ini yaitu proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, independensi komite audit, serta kualitas audit dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Sampel yang

digunakan dalam penelitian ini berjumlah 111 perusahaan jasa non keuangan yang terdaftar di BEI pada periode 2009-2011. Metode penentuan sampel yaitu purposive sampling method. Penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi yang menggunakan data laporan keuangan tahunan pada perusahaan yang terdaftar di BEI dan data dari Indonesia Capital Market Directory (ICMD). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda.

Hasil penelitian membuktikan good corporate governance berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dengan variabel kepemilikan institusional, independensi komite audit, kualitas audit, dan ukuran perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan saham institusional, independensi komite audit, kualitas audit, dan ukuran perusahaan, maka akan meningkatkan kinerja sebuah perusahaan. Variabel proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan asing tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan (Tobin's q).

Puniyasa dan Triaryati (2016) bertujuan untuk mengetahui pengaruh good corporate governance, struktur kepemilikan institusional, struktur kepemilikan manajerial, dan modal intelektual terhadap kinerja keuangan perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah 49 perusahaan yang masuk dalam indeks CGPI selama 2012-2014. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan sampel akhir yang didapatkan adalah 7 perusahaan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda.

Hasil analisis menunjukkan good corporate governance dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Namun dua variabel lain yaitu kepemilikan manajerial dan modal intelektual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Triyono dan Achyani (2016) bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas corporate governance dan kepemilikan institusi terhadap kinerja, nilai perusahaan serta risiko perusahaan. Penelitian didasarkan pada sampel perusahaan go public yang masuk dalam peringkat pada Corporate Governance Perception Index (CGPI) tahun 2008-2012 sejumlah 100 perusahaan. Metode analisis menggunakan regresi berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa ROA dan ROE berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan kualitas corporate governance, kepemilikan institusi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian sebelumnya, perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah dalam penelitian ini peneliti menggunakan perusahaan pertambangan batu bara yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) dari tahun 2009-2014. Penelitian ini dilakukan PIPM Bursa Efek Indonesia (BEI) yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.173 A Pekanbaru. Adapun perusahaan-perusahaan yang dijadikan sampel sebanyak 13 perusahaan pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam menentukan operasional variabel penelitian, peneliti memisahkan dalam dua bentuk, yaitu Variabel Terikat (dependent variabel) adalah Kinerja Keuangan yang diukur dengan Return On Asset (ROA). Sedangkan variabel bebas (independent variabel) yaitu Good Corporate Governance (GCG) yang diukur dengan Kepemilikan Intitusal.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
1.	Nugrahanti dan Shella Novia (2012)	Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Variabel Independen: -Kepemilikan Asing -Kepemilikan Pemerintah -Kepemilikan Institutional -Kepemilikan Manajerial	Regresi Linier Berganda	Kepemilikan Asing, Kepemilikan Pemerintah dan Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap risiko financial perusahaan. Sedangkan Kepemilikan Institutional berpengaruh positif terhadap risiko financial perusahaan.
2.	Prastya Puji Lestari (2013)	Variabel Dependen: Kinerja Perusahaan Variabel Independen: -Dewan Komisaris Independen -Kepemilikan Institutional -Kepemilikan Manajerial -Kepemilikan Asing -Independensi komite audit -audit quality	Regresi linear berganda	Good Corporate Governance berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dengan variabel kepemilikan institutional, independensi komite audit, kualitas audit, dan ukuran perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan saham institutional, independensi komite audit, kualitas audit, dan ukuran perusahaan, maka akan meningkatkan kinerja sebuah perusahaan. Variabel proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan asing tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan (Tobin's q)
3.	I.B Made Puniyasa dan Nyoman Triaryati(2016)	Variabel Dependen: Return on Asset (ROE) Variabel Independen: -Kepemilikan Institutional -Kepemilikan Manajerial -Modal Intelektual	Analisis regresi linear berganda	Good Corporate Governance tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROE) karena penerapan Good Corporate Governance bersifat jangka panjang sehingga akan sulit diukur dengan jangka waktu yang pendek menggunakan ROE. Sedangkan kepemilikan

				institusional, kepemilikan manajerial, dan modal intelektual berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROE)
4.	Triyono dan Fatchan Achyani (2016)	Variabel Dependen: (ROA dan ROE) Variabel Independen: -Kualitas Corporate Governance -Kepemilikan Institus	Regresi Berganda	ROA dan ROE berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan kualitas corporate governance, kepemilikan institusi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya selalu mengedepankan yang terbaik bagi semua pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Hal tersebut tidak lepas dari peran manajemen dalam mengatur dan mengelola perusahaan. Kinerja manajemen yang baik tercermin dari kinerja perusahaannya yang baik pula. Namun, adanya pemisahan kepemilikan oleh principal (pemilik perusahaan) dengan pengendalian agent (manajer) dalam sebuah organisasi cenderung menimbulkan konflik keagenan diantara principal dan agent.

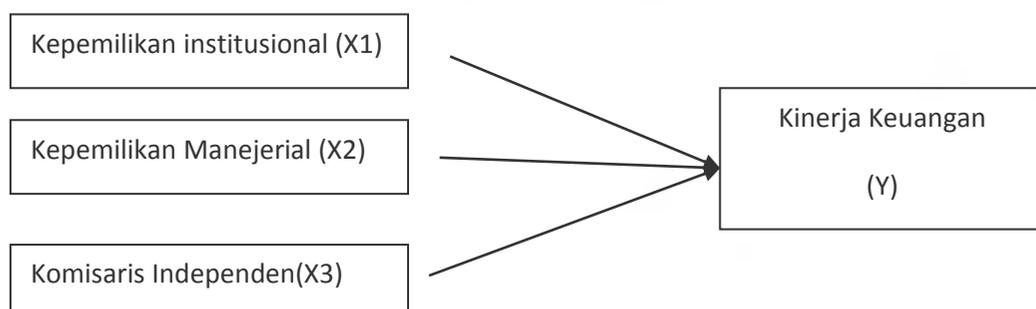
Jensen dan Meckling (1976) dalam Sabrinna (2010) menyatakan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial adalah dua mekanisme GCG yang dapat mengendalikan masalah keagenan.

Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit digunakan sebagai variabel independen untuk menjelaskan bagaimana mekanisme GCG mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan sebagai variabel dependen. Penelitian yang menguji mekanisme GCG mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan sudah banyak dilakukan. Namun,

beberapa penelitian ada yang menyatakan bahwa mekanisme GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Temuan penelitian Artanto & Novianti (2009), yang menyatakan tidak terdapat hubungan signifikan antara implementasi GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian oleh Hidayah (2008) dan Sayidah (2007) yang melakukan penelitian dengan obyek perusahaan yang masuk 10 besar Corporate Governance Perception Index (CGPI) menunjukkan tidak terdapat hubungan signifikan antara implementasi GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan. Tetapi di lain pihak menyatakan terdapat hubungan positif antara GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan. Seperti hasil penelitian dari Klapper dan Love (2002) dalam Sayidah (2007) menemukan adanya hubungan positif yang signifikan antara GCG dengan kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan Return on Asset (ROA) dan Tobin's Q. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Gompers, dkk. (2003) dalam Darmawati, dkk. (2004) yang menunjukkan hubungan positif antara indeks GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan jangka panjang.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan pada gambar berikut:



2.4 Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian, tinjauan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran teoritis, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : diduga ada pengaruh *good corporate Governance*(*kepemilikan institusional, kepemilikan manjerial, komisaris independen*) terhadap kinerja keuangan pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di BEI

